

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Konflik Palestina-Israel telah berlangsung beberapa dekade dan sampai saat ini belum memperlihatkan titik terang penyelesaian final bagi kedua belah pihak. Upaya-upaya perdamaian yang selama ini terus diusahakan oleh berbagai pihak selalu kandas di tengah jalan. Berlarut-larutnya konflik serta tertundanya penyelesaian final tersebut telah menyebabkan penderitaan yang sangat berat, khususnya bagi rakyat Palestina.

Inti dari permasalahan Palestina dan Israel adalah bagaimana cara memulihkan kedaulatan yang sah bagi rakyat Palestina dan mendirikan negara yang merdeka di tanah leluhurnya sendiri. Perjuangan rakyat Palestina dalam mewujudkan tujuan tersebut merupakan masalah yang hakiki dan oleh karenanya perlu mendapat dukungan Internasional. Dari paparan diatas maka penulis bermaksud untuk mengangkat masalah tersebut dengan menggunakan cara pandang dari sisi dalam tubuh bangsa Palestina itu sendiri. Dalam hal ini permasalahannya adalah konflik perang saudara antara Hamas dan Al-fatah didalam tubuh bangsa Palestina, dimana konflik ini juga merupakan salah satu faktor kunci utama dari berlarut-larutnya penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengambil judul : **PENGARUH BERSATUNYA HAMAS DAN AL-FATAH TERHADAP PROSES PERDAMAIAN ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA TAHUN 2011 -2012**

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui sejauh mana pengaruh perdamaian antara Hamas dan Al Fatah terhadap hubungan antara Palestina dan Israel.
2. Melihat reaksi dunia Internasional terhadap peluang perdamaian Palestina - Israel, dan masa depan rakyat Palestina.
3. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan S-1 pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **C. Latar Belakang**

Konflik Israel-Palestina adalah bagian dari konflik Arab-Israel yang lebih sempit, yaitu konflik yang berlanjut antara bangsa Israel dan bangsa Palestina. Konflik antara Palestina dan Israel yang berkepanjangan dan menimbulkan kerugian moral, materil, dan jiwa membuat berbagai negara-negara di belahan dunia turut bersimpati. Simpati terhadap Palestina tersebut sebagian besar datang dari negara-negara Islam, serta dukungan terhadap eksistensi Israel datang karena kuatnya lobi Yahudi pada parlemen-parlemen Negara Adil Kuasa yang berhasil menduduki posisi penting dalam struktur birokrasi di negara-negara maju. Di kedua komunitas terdapat orang-orang dan kelompok-kelompok yang menganjurkan penyingkiran teritorial total dari komunitas yang lainnya, sebagian menganjurkan Solusi Dua Negara dan sebagian lagi menganjurkan Solusi Dua Bangsa dengan Satu Negara Sekular yang mencakup wilayah Israel masa kini, Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

Di dalam tubuh bangsa Palestina sendiri telah lama terjadi perpecahan antara dua kelompok besar politik, kelompok pejuang Hamas dan Al-Fatah yang telah berlangsung lama dan mengakibatkan kerugian moril, materil bahkan ribuan jiwa terbuang percuma. Al-Fatah dan Hamas saling berbeda pendapat tentang tujuan-tujuan bagi bangsa Palestina.. Dan hal ini juga mengakibatkan tidak pernah terciptanya suatu bentuk kesepakatan dalam mencari solusi kongkrit penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

Gerakan Hamas sendiri adalah gerakan jihad dalam arti yang luas menurut konsepsi jihad. Ia merupakan bagian dari gerakan Kebangkitan Islam (*an nahdhah al islamiyah*) yang meyakini bahwa kemerdekaan merupakan gerbang utama bagi kemerdekaan rakyat Pelestina, mulai dari Sungai Yordan sampai Laut Tengah. Hamas adalah gerakan kerakyatan, karena merupakan ekspresi kongkret dari arus rakyat yang luas dan mengakar dalam barisan putra-putri bangsa Palestina dan Umat Islam, yang memandang bahwa Aqidah dan Motivasi ke-Islaman adalah dasar yang tepat untuk melawan musuh yang membawa motivasi aqidah dan program yang bertentangan dengan seluruh upaya kebangkitan yang terjadi di dalam Umat (*an nahdhatu fil ummah*).

Dalam barisan Hamas, terhimpun semua unsur umat Islam yang meyakini pemikiran dan prinsip-prinsipnya, sanggup memikul seluruh konsekuensi pertarungan dan perlawanan menghadapi proyek Zionisme. Hamas menyebarkan manifesto pendiriannya pada tanggal 15 Desember 1987, meskipun kemunculannya berakar mulai sejak dekade 40-an. Pada abad ini Hamas lahir sebagai hasil dari akumulasi berbagai faktor yang dialami oleh rayat Palestina,

sejak tragedi (*nakbah*) pertama tahun 1948 secara umum dan kekalahan perang tahun 1967 secara khusus. Dari berbagai faktor tersebut muncul dua faktor utama yaitu: (1) perkembangan politik masalah Palestina dan akibat-akibatnya hingga akhir tahun 1987, (2) dan kebangkitan Islam di Palestina serta hasil-hasil yang dicapai hingga pertengahan dekade 80-an.

Kemunculan Hamas menimbulkan kegelisahan Israel. Aparat Intelijen Zionis Israel mengerahkan segala kekuatannya untuk mengawasi Hamas dan pimpinannya. Begitu rezim Imperialis Israel melihat sambutan masa dalam aksi-aksi mogok, dan aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan Hamas sejak awal bertolak dan keluarnya Dokumen Gerakan, maka mulailah penangkapan bertubi-tubi dilancarkan terhadap kader-kader Gerakan dan para pendukungnya sejak saat itu.

Sekarang ini, Hamas berdiri sebagai kekuatan pertama dalam menghadapi proyek Zionisme Israel. Hamas, meski menghadapi aksi permusuhan yang luas, masih menjadi kekuatan yang mampu menjaga kelanjutan isu Palestina, serta memberikan kepada rakyat Palestina, seluruh bangsa Arab, Dunia Islam dan seluruh pencinta kemerdekaan di dunia rasa percaya akan kemungkinan menghadapi proyek Zionisme Israel. Pada dekade 90-an adalah masa keemasan Hamas, yang mampu memberikan harapan kekalahan dan kehancuran Israel. Gerakan Hamas telah menegaskan berkali-kali bahwa Hamas tidak anti perdamaian. Bahkan Hamas menyetujui perdamaian, mengajak kepada perdamaian, dan berusaha merealisasikan perdamaian. Hamas sepakat dengan seluruh negara-negara di dunia tentang perlunya perdamaian mendominasi

seluruh penjuru dunia. Tetapi Hamas hanya menyetujui perdamaian yang adil yang mengembalikan seluruh hak-hak bangsa Palestina, sehingga mereka bisa menggunakan hak mereka dalam kemerdekaan, kembali ke tanah air mereka, dan menentukan nasib mereka. Hamas memandang bahwa kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai hingga saat ini, tidak memenuhi tuntutan-tuntutan rakyat Palestina, juga tidak memenuhi batas minimal keinginan mereka.<sup>1</sup>

Sedangkan Fatah atau *Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini* atau Gerakan Nasional Pembebasan Palestina, adalah sebuah partai politik di Palestina yang didirikan pada tahun 1958. Partai ini memiliki tujuan untuk mendirikan negara Palestina di daerah yang sedang menjadi tempat konflik Israel dan Palestina. Fatah sebenarnya secara teknis bukan merupakan partai politik, namun adalah salah satu faksi dalam PLO, sebuah konfederasi multipartai.

Fatah didirikan pada tahun 1958 atau 1959 oleh sekelompok warga Palestina yang menempuh pendidikan di Kairo, Mesir; salah satunya Yasser Arafat. Setelah Perang Enam Hari pada tahun 1967, Fatah muncul sebagai kekuatan yang dominan dalam dunia politik di Palestina. Pada akhir 1960-an, Fatah bergabung dengan PLO dan pada tahun 1969 menjadi pemimpin dalam PLO. Sejak saat itu, Arafat menjadi pemimpin PLO dan Fatah hingga meninggal dunia pada tahun 2004. Posisinya sebagai ketua Fatah digantikan Farouk Kaddoumi. Kelompok ini terlibat konflik dengan kelompok Hamas setelah

---

<sup>1</sup> [www.infopalestina.com](http://www.infopalestina.com)

kemenangan kelompok Hamas pada Pemilu parlemen tahun 2006 lalu di Palestina.<sup>2</sup>

PLO didirikan pada tahun 1964, setelah didahului oleh langkah awal Alm. Yasser Arafat untuk menyatukan semua organisasi perlawanan Palestina di bawah satu wadah, Al-fatah, pada 1950-an. Di awal pendirian, PLO di bawah dukungan Arafat dengan Al-fatah-nya, menyerang Israel secara terus-menerus. Israel menjawab dengan secara rutin menyerang basis PLO di Lebanon. Tak jarang korban yang berjatuh dari kalangan sipil serta perempuan dan anak-anak.

Organ utama lembaga ini ialah Komite Eksekutif, Komite Sentral serta Dewan Palestina. Terpenting dari antaranya ialah Komite Eksekutif, yang bertugas mengambil keputusan-keputusan politik. Dalam mengambil keputusan, organ ini menerima masukan serta nasehat dari Komite Sentral, yang hampir kesemua anggotanya diambil dari organisasi perlawanan dan tokoh-tokoh independen. Dewan Nasional.

Menurut Amien Rais, ada beberapa yang menjadi hambatan besar dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Pertama, sikap yang wishy-washy di pihak AS dalam menghadapi setiap tindakan politik Israel yang bertentangan dengan hukum internasional. Kedua, AS cenderung bermain 'dua wajah' yang selalu menguntungkan Israel. Karena selalu diuntungkan oleh permainan politik AS di Timur Tengah, Israel merasa mendapat dukungan yang sangat andal dan pada gilirannya memperkeras posisinya untuk tidak kompromi dengan pihak Arab dan

---

7 [www.wikipedia.org/wiki/fatah](http://www.wikipedia.org/wiki/fatah)

Palestina.<sup>3</sup> Dari tahun 1972 hingga tahun 1996, AS telah memveto 30 kali resolusi PBB yang mengutuk Israel, sementara itu pemimpin Israel telah menerapkan program disintegrasi terhadap Israel.<sup>4</sup> Dan hingga tahun 2004, AS telah melakukan veto yang ke-79 kalinya. Ketiga, rintangan terbesar sebenarnya adalah sikap Israel sendiri, yakni sikap politik, ideologis dan biblikal untuk tidak mengembalikan Tepi Barat dan Jalur Gaza kepada Palestina. Sikap ini telah ditanamkan Manachem Begin sejak pertengahan 1970-an yang kini telah menjadi sikap nasional Israel. Penggunaan politik mitos, baik mitos teologis maupun mitos abad kedua puluh satu, dipakai sebagai alat untuk lobi-lobi dalam mencapai tujuan-tujuan Israel.<sup>5</sup> Mitos-mitos tersebut adalah mitos tanah yang dijanjikan, mitos bangsa terpilih, mitos Yosua, mitos antifasisme orang Zionis, mitos pengadilan Nuremberg, mitos Holocaust, dan mitos tanah tanpa bangsa untuk bangsa tanpa tanah. Keempat, dari pihak Arab ada kantung-kantung tertentu yang menyulitkan tercapainya perdamaian, terutama kelompok-kelompok yang menolak setiap kompromi dengan Israel. Terakhir yang menjadi faktor penghambat adalah adanya faktor perbedaan antar-Arab tentang solusi masalah Palestina.

PLO terus memperjuangkan aspirasinya membentuk negara Palestina merdeka. Selama tujuan ini belum tercapai, konflik Israel-Palestina tetap akan berlanjut. Bahkan perang mungkin bisa meletus kembali, terutama jika Arab frustrasi akibat gagal mencapai tujuannya melalui diplomasi. Sebaliknya, Israel tidak akan segan mengurbankan upaya perdamaian jika situasi mengancam

---

<sup>3</sup> Riza Sihbudi, *Timur Tengah, Dunia Islam dan Hegemoni Amerika*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993. hal. 14-15

<sup>4</sup> Garaudy, *Mitos dan Politik Israel (terj.)*. Jakarta, Gema Insani Pres, 2000. hal. viii

<sup>5</sup> *Ibid*

eksistensi negara dan bangsanya. Hal itu bisa dilihat dari penolakan Israel terhadap tawaran rencana perdamaian yang dilontarkan oleh Liga Arab pada KTT Liga Arab pada tanggal 27-28 Maret 2002 di Beirut.<sup>6</sup> Sikap ini sesuai dengan paradigma hubungan internasional, bahwa suatu negara tidak mustahil akan mengorbankan perdamaian andaikata keselamatannya terancam.<sup>7</sup> Eksistensi negara adalah kepentingan nasional primer atau vital sehingga tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun.

Sekalipun konflik Timur Tengah tampaknya tidak diorientasikan pada perang total yang membawa kehancuran semua pihak, namun tetap akan berdampak negatif baik dalam menghambat pembangunan maupun membawa korban materi dan jiwa. Oleh karena itu sangat dimaklumi jika banyak orang yang menghendaki perdamaian di kawasan tersebut.

Sebelum terjadinya kesepakatan damai antara Hamas dan Al-fatah di Makkah, Hamas terlebih dahulu telah memenangkan Pemilihan Umum di Palestina pada bulan Maret 2006, mengungguli Partai-Partai yang lainnya, termasuk Partai Al-fatah itu sendiri. Kemenangan Hamas dalam Pemilu ini semakin memperuncing permusuhan dan perang saudara yang terjadi di antara ke-duanya. Kemenangan Hamas itu juga menyebabkan terjadinya Embargo dan Sanksi-Sanksi Ekonomi lain yang diberlakukan terhadap Pemerintahan Palestina oleh Negara-negara besar barat dan Israel. Presiden Mahmout Abbas sendiri berharap dapat meredakan pertikaian antar-kelompok Palestina itu dan membujuk negara-negara Barat serta Israel mengakhiri sanksi-sanksi yang telah melumpuhkan ekonomi Palestina

---

<sup>6</sup> *Republika*, 30 Maret 2002

<sup>7</sup> Raymond Arond, *Peace and War: A Theory of International Relations*, New York: Anchor Books, 1973. hal. 100

dengan membentuk pemerintah koalisi persatuan pada Maret, yang mencakup para menteri Fatah di bawah Perdana Menteri Ismail Haniyeh ( Hamas). Namun, embargo itu masih tetap diberlakukan pada pemerintah Palestina.

Presiden Mahmoud Abbas sangat kecewa atas berlanjutnya embargo kemudian berharap dengan membentuk pemerintah persatuan, sanksi-sanksi itu akan dicabut.<sup>10</sup> Pertemuan Makkah antara Hamas dan Al-Fatah menghasilkan kesepakatan yang melegakan kedua belah pihak, poin-poin terpenting dari hasil kesepakatan tersebut adalah :

1. Kedua faksi di Palestina itu sepakat untuk berbagi kursi di kabinet , yang segera akan mengakhiri konflik yang sempat meruncing di antara keduanya.
2. Langkah penting untuk mencegah perang saudara, menetapkan PM Ismail Haniya tetap memegang jabatannya.
3. Pos penting Menteri Dalam Negeri diberikan kepada kelompok independent.

Al-Fatah akan menerima jabatan Deputy Perdana Menteri <sup>8</sup>

Dokumen itu yang dipuji sebagai awal satu "Era Baru", di tandatangi di Kairo, Mesir, pada tanggal 27 April 2011 oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas, yang memimpin partai Fatah dan pemimpin gerakan Hamas di pengasingan Khaled Meshaal, dengan disaksikan Raja Abdullah dari Arab Saudi.<sup>9</sup>

Dari berbagai dinamika konflik yang menarik untuk diteliti adalah perundingan atas konflik Hamas dan Al-Fatah yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap perdamaian Israel -Palestina, perundingan tersebut tidak semata-mata untuk menyelesaikan konflik Perang Saudara antara Hamas

---

<sup>8</sup> <http://www.infopalestina.com/indexsberita.asp>, 107

<sup>9</sup> *Republika*, 12 Februari 2011

dan Al-Fatah yang telah lama terjadi, tetapi terhadap kepentingan-kepentingan lain yang mendorong beberapa negara yang terkait khususnya Arab Saudi dan Amerika Serikat.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di tarik pokok permasalahan dan memunculkan sebuah pertanyaan:

Bagaimana Proses bersatunya Hamas-Fatah dalam menghadapi agenda perdamaian antara Israel dan Palestina 2011-2012?

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam menyelesaikan rumusan masalah penulis menggunakan konsep/teori :

##### **1. Teori Negosiasi**

Konflik Israel-Palestina merupakan konflik yang tergolong abadi di kawasan Timur Tengah, karena upaya-upaya proses perundingan yang selalu di akhiri dengan kegagalan, disamping karena persoalan yang sudah mengakar ku at hingga sampai anak cucu, juga di sebabkan adanya kelemahan dan perbedaan kedua belah pihak yang sangat mendasar. Ada beberapa syarat yang harus di penuhi demi tercapainya suatu negosiasi:

*“ Two element must be present for negotiation take place ; there must be both comment interest and issues of conflict. Whithout comment interest there’s nothing to negotiate for, whithout issues of conflict there’s nothing to negotiate about<sup>10</sup>*

---

<sup>10</sup> Fred. C. Ikle “*Negotiation*”, dalam Craig dan George, *Introduktion to International Politics Prentice*

Sementara Robert C. Kelment menyatakan bahwa keberhasilan perundingan akan tergantung pada bagaimana menciptakan suatu momen yang tepat. Momen yang tepat bagi suatu perundingan akan sangat tergantung pada :

1. Prinsip dan Pragmatis (*Principle and pragmatism*) artinya sebelum memasuki perundingan pihak-pihak yang berunding harus telah sepakat terlebih dahulu mengenai hal-hal prinsip yang telah menjadi sengketa. Untuk mencapai kesepakatan yang prinsip ini maka di perlukan komitmen (*comitment*) dan tanggung jawab moral untuk saling menerima dan memberi prinsip-prinsip yang mereka sengketa secara timbal balik. Inti dari komitmen itu sendiri dengan dimensi moral bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk bersedia berunding dan mentaati hasil perundingan. Sebelum ada kesepakatan maka berarti belum terdapat momentum yang tepat bagi kedua belah pihak melakukan perundingan. Sedangkan pragmatis (*pragmatism*) sebagai persyaratan tercapainya perdamaian, atau menurut Kelment “ *pragmatism is sine qua non for amuttually acceptable peace* “ artinya perundingan tersebut harus pragmatis atau mudah untuk melaksanakan dan menghasilkan kesepakatan yang dapat di terima oleh kedua pihak sehingga terwujud perdamaian”.

Terdapat tiga pragmatisme yang akan memegang peranan dalam proses perundingan perdamaian ;

- a. Adanya keterpaksaan tekanan (*compulsion*) yang membuat pihak-pihak yang bersengketa bersedia untuk berunding. Kondisi ini akan dapat menciptakan momentum yang tepat untuk melakukan perundingan.
  - b. Pragmatisme yang dilandasi adanya jaminan masa depan yang lebih baik (*vision of the future*), yang artinya suatu perundingan dianggap pragmatis apabila memenuhi adanya jaminan masa depan yang lebih baik lagi bagi kedua belah pihak dalam masa datang meskipun mereka harus terlebih dahulu mengorbankan sesuatu.
  - c. Pragmatisme dilandasi akan adanya kepentingan (*interest*) yang apabila masing-masing pihak sama-sama memiliki suatu kepentingan untuk memecahkan status quo berdampak membahayakan kedua pihak sehingga perlu dirubah, walaupun faktor kepentingan sebagai syarat akan keberhasilan sebuah perundingan, tetapi terkadang juga bisa menjadi penghambat perundingan karena terbentur oleh perbedaan kepentingan yang mendasar.
2. Keberhasilan suatu perundingan harus adanya komitmen untuk saling mengakui eksistensi masing-masing (*acknowledgment*)<sup>11</sup>. Pengakuan eksistensi kebangsaan atau negara masing-masing akan dapat menjembatani hal-hal yang tidak pasti diluar inti yang menjadi sengketa mereka. Untuk kedua belah pihak ini mempunyai komitmen untuk saling mengakui berkaitan masalah prinsip yang mereka sengkatakan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi demi tercapainya suatu negosiasi, seperti yang telah diterjemahkan sebagai berikut : “ Harus ada dua

---

<sup>11</sup> [Http://www.infopalestina.com/indexberita.asp](http://www.infopalestina.com/indexberita.asp), 106

element didalam negosiasi : harus ada persamaan kepentingan dan isu -isu dari konflik ”. Tanpa kesamaan kepentingan tidak ada yang dinegosiasikan, tanpa isu-isu konflik juga tidak ada yang dinegosiasikan<sup>12</sup>. Diakui secara luas bahwa salah satu fungsi utama diplomasi adalah negosiasi.<sup>13</sup>

Poin terpenting dari hasil kesepakatan damai antara Hamas dan Al -fatah adalah kedua faksi di Palestina itu sepakat untuk saling berbagi kursi dikabinet, dan menduduki pos-pos penting didalam pemerintahan Palestina. Terakhir pengakuan harus dirumuskan oleh kedua belah pihak secara bersama-sama untuk mencapai kehendak masing -masing tanpa membahayakan kepentingan yang lain. Yang tentu saja nantinya akan lebih meringankan langkah ke dua negara demi tercapainya suatu bentuk perdamaian yang nyata didalam menjalin hubungan bilateral antara Israel dan Palestina kearah yang lebih baik lagi.

## **F. Hipotesa**

Melalui pendekatan-pendekatan di atas maka dapat di tarik hipotesis : proses negosiasi hamas fatah melalui :

1. *Memorandum Sharm el-Sheikh*
2. Pertemuan Washington
3. Proses Negosiasi Perdamaian di Yordania.

---

<sup>12</sup>Fred. C. Ikle “Negitiation” dalam Craig dan George, Introduction to International Politics, Prentice Hall, 1980, hal. 57

<sup>13</sup> S. L. Roy, *Diplomasi, Rajawali Pers*, Jakarta, hal. 17

### **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian pada skripsi ini adalah pada tahun 1993 - 2011 sekarang ini, dari Perundingan Oslo I tahun 1993 sampai dengan perundingan kesepakatan damai antara Hamas di Mesir Tahun 2011

### **H. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, yakni dengan mencari data dari berbagai perpustakaan, dari media cetak, media elektronik, dari berbagai makalah, literature, dan berbagai situs-situs website di internet lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

### **I. Sistematika penulisan**

Bab I Berisi tentang Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Pemikiran, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Konflik antara Palestina dan Israel. Berisi tentang awal konflik Palestina dan Israel. Berbagai peperangan dan perjanjian damai yang pernah di tempuh Palestina- Israel, Sikap Dunia Internasional

Bab III Konflik perang saudara antara Hamas dan Al-Fatah, sampai dengan terjadinya kesepakatan Tahun 2011. Berisi tentang sejarah perang saudara antara Hamas dan Al-fatah, sampai dengan terjadinya perjanjian kesepakatan damai antara Hamas dan Al-fatah di Mesir Tahun 2011.

Bab IV Proses pengaruh bersatunya Hamas dan Al-Fatah terhadap proses perdamaian antara Israel Dan Palestina tahun 2011-2012

Bab V Kesimpulan.